
Evaluasi Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kota Palu

Ari Hendro Priyono¹, Moh. Irfan Mufti², Nasrullah³

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia

E-mail: coconutroempah@gmail.com

Article History:

Received: 13 Mei 2026

Revised: 30 Mei 2026

Accepted: 03 Juni 2026

Keywords: *Evaluation, Self-Help Housing Stimulant Assistance, CIPP Model, Palu City.*

Abstract: *This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of a local government assistance program in improving the quality of housing for low-income communities. The Housing Rehabilitation Program, known as the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSRS), is one of the policy initiatives of the Palu City Government to alleviate poverty by providing decent, safe, healthy, and comfortable housing for the extremely poor. However, based on data from the Palu City Housing and Settlement Agency, there remains a gap between the number of uninhabitable houses and the number of beneficiaries, as well as disparities in distribution across regions. This research employs a descriptive qualitative approach using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model developed by Daniel L. Stufflebeam. Data sources were obtained through in-depth interviews, field observations, and document analysis of official records from the Palu City Housing and Settlement Agency. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The results indicate that, in terms of context, the BSRS program is relevant to the needs of low-income communities in West Palu District. From the input perspective, planning and resources have been prepared; however, there are still limitations in budget allocation and inequities in aid distribution. In terms of process, program implementation generally follows technical guidelines, although field constraints were identified, including delays in material distribution, limited labor availability, and low beneficiary understanding of the self-help concept. From the product perspective, the program has had a positive impact in improving housing quality and community welfare, although the sustainability of housing maintenance remains a challenge. The study concludes that the BSRS program in West Palu District has provided tangible benefits to low-income communities, despite its*

implementation not yet being optimal in terms of equity and efficiency. The researcher recommends that the Palu City Government enhance the integration of beneficiary data, strengthen technical supervision in the field, and develop post-assistance economic empowerment programs to ensure the sustainability of program outcomes.

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords: Evaluasi, Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, Model CIPP, Kota Palu.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program bantuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Palu untuk mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni yang aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat miskin ekstrem. Namun, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu, masih ditemukan kesenjangan antara jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan jumlah penerima bantuan, serta adanya ketimpangan distribusi antarwilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen resmi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks, program BSRS relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin di Kecamatan Palu Barat. Dari aspek input, perencanaan dan sumber daya telah disiapkan, tetapi masih terdapat keterbatasan anggaran dan ketimpangan dalam pendistribusian bantuan. Pada aspek proses, pelaksanaan program secara umum berjalan sesuai petunjuk teknis, namun di lapangan ditemukan kendala seperti keterlambatan distribusi material, keterbatasan tenaga kerja, serta rendahnya pemahaman penerima terhadap konsep swadaya. Sedangkan dari aspek produk, program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas hunian dan taraf hidup masyarakat, namun keberlanjutan pemeliharaan rumah masih menjadi

tantangan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Program BSRS di Kecamatan Palu Barat telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun pelaksanaannya belum optimal dari segi pemerataan dan efisiensi pelaksanaan. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kota Palu meningkatkan integrasi data penerima manfaat, memperkuat pengawasan teknis di lapangan, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi pasca-bantuan untuk menjaga keberlanjutan hasil program.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan yang dihadapi oleh seluruh Negara berkembang, salah satunya Indonesia. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan seorang individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, bahkan juga mencerminkan suatu keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Oleh sebab itu, pencegahan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional hingga pembangunan daerah. Menurut Ritonga (2003) dalam (Desyra et al., 2021) Kemiskinan adalah suatu keadaan dan kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang cukup.

Salah satu kebutuhan paling mendasar manusia adalah memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga berperan dalam memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, dan fisiologis penghuninya. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal sebagai hunian yang layak, rumah harus memenuhi sejumlah persyaratan fisik, seperti keamanan bangunan, tingkat kenyamanan yang memadai, serta kelayakan untuk dihuni.

Penyediaan hunian layak huni tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta belum meratanya akses terhadap infrastruktur dasar. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni dengan fasilitas yang terbatas.

Masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi kendala dalam mewujudkan hunian yang memenuhi standar kelayakan dan permasalahan tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya teratasi. Di Indonesia, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap menjadi isu yang signifikan dalam konteks pembangunan perumahan dan permukiman. Sebab itu, diperlukan pendekatan khusus untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu faktor penyebab yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah kondisi ekonomi masyarakat, di mana tingkat pendapatan yang dimiliki tidak sebanding dengan harga rumah yang memenuhi standar kelayakan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh hunian yang layak, bahkan tidak sedikit di antaranya yang terpaksa menempati rumah yang tidak layak huni (Septian Nugraha, 2024). Menanggapi

permasalahan tersebut, pemerintah kemudian menginisiasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu upaya intervensi untuk meningkatkan kualitas hunian rumah tidak layak huni melalui pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat. Adap

Untuk mendukung pelaksanaan program ini didasari oleh aturan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 dan Nomor 13/PRT/M/2016 yaitu tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Peraturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS (Hilmi et al., 2018). Pada dasarnya, program BSPS bertujuan untuk memberi peluang pada masyarakat untuk lebih berkontribusi pada proses pembangunan rumah dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek tersebut.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut juga di implementasikan di Kota Palu sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Di Kota Palu sendiri, program tersebut dinamakan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS). Tercatat pelaksanaan kegiatan program BSRS di Kota Palu dilakukan dengan dua jenis peningkatan yaitu Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK). Berikut ini merupakan jenis pemanfaatan bantuan di Kota Palu sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, yaitu;

Tabel 1. Jenis Kegiatan Program BSRS dan Anggaran BSRS

Jenis Bantuan	Bahan Bangunan	Upah Kerja	Total
Peningkatan Kualitas	Rp. 17.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 20.000.000
Pembangunan Baru	Rp. 47.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 50.000.000

Sumber: Dinas Perkim Kota Palu, 2025

Kota Palu pada tahun 2021-2024 yang mendapat bantuan dari program BSRS terhadap rumah tidak layak huni sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penerima Program BSRS Pada Tahun 2021-2024

Kecamatan	2021	2022	2023	2024
Palu Timur			17	13
Palu Selatan			27	
Palu Barat			21	
Palu Utara	47		71	
Mantikolore		15	79	18
Tatanga			27	
Tawaeli			59	
Ulujadi		18	48	
Total	47	33	350	31

Sumber: Rekap Data Bidang Perumahan dari Disperkim Tahun 2021-2024

Jumlah penerima BSRS di Kota Palu tahun 2021-2024, yang menerima bantuan dari program tersebut diberikan kepada masyarakat berdasarkan usulan dari kelurahan di setiap kecamatan yang melalui skema identifikasi dan verifikasi lapangan. Melalui program BSRS terhadap rumah tidak layak huni di Kota Palu yang sudah terlaksana.

Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi standar kelayakan huni melalui pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan. Program ini dirancang sebagai bentuk stimulan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki kondisi rumahnya. Selain itu, BSRS bertujuan untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan tercipta hunian yang aman, sehat, dan nyaman, serta lingkungan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan. Di sisi lain, program ini juga berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis pembangunan rumah, sehingga mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam penyediaan hunian yang layak secara berkelanjutan.

Di Kota Palu, pelaksanaan program BSRS menjadi sangat penting, mengingat kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat yang beragam, serta adanya kebutuhan yang cukup besar terhadap hunian layak, terutama pascabencana yang pernah terjadi. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni sekaligus meningkatkan kualitas permukiman masyarakat secara bertahap.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta mendukung terwujudnya permukiman yang layak, aman, dan sehat, program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam penanganan perumahan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan fisik semata, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan rumah secara swadaya. Namun demikian, dalam pelaksanaan program ini sangat dipengaruhi oleh kondisi riil di lapangan, khususnya terkait dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Palu

Kecamatan	2021	2022	2023	2024
Palu Timur	57	57	82	70
Palu Selatan	171	171	202	200
Palu Barat	122	122	163	125
Palu Utara	167	167	183	179
Mantikolore	230	235	234	198
Tatanga	98	98	136	107
Tawaeli	88	91	187	187
Ulujadi	244	252	238	232
Total	1.177	1.193	1.425	1.298

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu di olah penulis 2025

Data diatas menunjukkan masih banyaknya masyarakat Kota Palu yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni, data tersebut menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Palu.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal yang, pelaksanaan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) masih menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian. Secara normatif, kebijakan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya telah memiliki landasan regulasi yang jelas serta pedoman teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan program.

Salah satu indikator yang menunjukkan belum optimalnya program ini adalah masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di kelurahan, baik di kawasan perkotaan maupun pinggiran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi yang telah dilakukan melalui program BSRS belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program tersebut. Selain itu, berkaitan dengan anggaran yang diberikan tidak akan cukup merubah status Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni, sehingga daya tahan bangunan yang dihasilkan tidak bertahan lama.

Perihal aspek pembiayaan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) juga menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius. Besaran anggaran yang diberikan dalam program ini pada dasarnya bersifat stimulan, yaitu hanya sebagai pemicu atau pendorong bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah secara swadaya. Namun dalam praktiknya, jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat seringkali belum memadai untuk mengubah secara menyeluruh kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung pada kualitas pembangunan atau rehabilitasi rumah yang dilakukan. Masyarakat penerima bantuan, khususnya yang tergolong berpenghasilan rendah, umumnya memiliki keterbatasan kemampuan finansial untuk menambah kekurangan biaya yang dibutuhkan.

Wilayah kumuh merupakan kawasan permukiman yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian, ditandai oleh kondisi bangunan yang tidak teratur, kepadatan tinggi, serta keterbatasan akses terhadap prasarana dan sarana dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 653/DPKP-Perumahan/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palu Tahun 2022, Pemerintah Daerah telah menetapkan sejumlah titik kawasan kumuh sebagai bagian dari upaya identifikasi dan penanganan yang terarah dan terukur. termasuk di Kecamatan Palu Barat yang masih menunjukkan karakteristik kekumuhan seperti kepadatan bangunan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas hunian. Dalam konteks tersebut, program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) menjadi salah satu instrumen strategis yang digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Keterkaitan antara wilayah kumuh dan pelaksanaan BSRS terletak pada fokus intervensinya, yaitu perbaikan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya penanganan kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, BSRS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan fisik semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi penataan permukiman yang mendukung pengurangan luas kawasan kumuh, khususnya di Kecamatan Palu Barat, melalui peningkatan kualitas hunian.

Tabel 4. Jumlah BSRS dan RTLH Kecamatan Palu Barat

Kelurahan	BSRS	RTLH
Balaroa	4	29
Siranindi	1	5
Ujuna	9	90
Kamonji	2	11
Baru	1	4
Lere	4	24
Total	21	163

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023, diolah penulis 2026

Berdasarkan data diatas, Kecamatan Palu Barat tercatat jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai 163 unit, sementara jumlah bantuan yang direalisasikan melalui Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) hanya sebanyak 21 unit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui program BSRS baru mencapai sekitar 12,88%, sehingga masih terdapat 142 unit RTLH (87,12%) yang belum tertangani. Kondisi ini secara nyata memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan masyarakat akan hunian layak dan kapasitas intervensi program pemerintah.

Oleh karena itu, melihat permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan serta pelaksanaan di lapangan, khususnya pada aspek tujuan program, pembiayaan, efektivitas penyaluran bantuan, serta kemampuan swadaya masyarakat penerima. Maka dari itu, penulis tertarik mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kota Palu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu selama enam bulan dengan fokus pada Kecamatan Palu Barat sebagai wilayah yang memiliki permasalahan permukiman kumuh. Informan dipilih secara purposive, melibatkan pihak terkait seperti kepala bidang, fasilitator teknis, serta penerima bantuan. Penelitian ini mengkaji Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan evaluasi yang digunakan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai keberhasilan program secara komprehensif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Context

Menurut Stufflebeam (1967), komponen *context* dalam model evaluasi CIPP berfokus pada upaya mengidentifikasi kebutuhan, masalah, serta peluang yang menjadi dasar dirancang dan dilaksanakannya suatu program. Indikator ini dievaluasi melalui kesesuaian tujuan program dan visi misi organisasi dan relevansi kebutuhan penerima manfaat.

Menurut Ibu Nurfiyanti, Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya setelah bencana tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki kemampuan finansial untuk memperbaiki tempat tinggal mereka agar memenuhi standar hunian layak, aman, dan sehat. Namun, Ia juga menyoroti Program BSRS hadir sebagai intervensi pemerintah untuk menjawab kebutuhan dasar tersebut melalui peningkatan kualitas rumah. Dalam pelaksanaannya, sasaran penerima manfaat ditetapkan secara partisipatif dan transparan melalui proses verifikasi dan validasi data RTLH oleh fasilitator serta musyawarah di setiap kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan paling membutuhkan.

Berbeda dari Nurfiyanti yang menyoroti intervensi pemerintah untuk menjawab kebutuhan

dasar, Bapak Yana lebih menekankan pada menitik beratkan pada dimensi kebijakan dan urgensi sosial, dengan menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok MBR dan masyarakat miskin ekstrem, terutama di wilayah Palu Barat.

Sementara itu, Bapak Irsan menyebut bahwa kondisi awal sebelum intervensi program menunjukkan ketidaklayakan hunian yang sangat tinggi. Rumah yang ditempati beliau terbuat dari dinding papan, atap seng yang bocor, serta lantai tanah, yang tidak mampu melindungi penghuni dari kondisi cuaca ekstrem. Ketika hujan turun dengan intensitas sedang, rumah tersebut bahkan tergenang air hingga mencapai 60 cm, menyebabkan barang-barang rumah tangga rusak dan aktivitas keluarga terganggu. Keadaan ini mencerminkan konteks permasalahan sosial dan lingkungan yang menjadi dasar perlunya pelaksanaan program BSRS. Rumah Bapak Irsan tidak hanya tidak memenuhi standar kelayakan hunian, tetapi juga akan mengganggu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, terutama bagi anak-anak yang harus tinggal dalam kondisi sempit dan tidak higienis.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Pak Sofyan mengatakan bahwa bantuan diperoleh gambaran bahwa kondisi rumah yang beliau tempati sebelum menerima bantuan tergolong tidak layak huni dan berada dalam posisi rawan banjir. Rumah Bapak Sofyan terletak lebih rendah dari permukaan jalan lorong, sehingga setiap kali hujan turun, rumahnya selalu tergenang air. Situasi ini membuat penghuni rumah sering kali pasrah terhadap keadaan, karena banjir menjadi kejadian yang berulang dan sulit dihindari.

Berdasarkan data sekunder terkait perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Palu Barat, masih terdapat jumlah rumah yang signifikan dengan kondisi fisik yang tidak memenuhi standar hunian layak, terutama pascabencana gempa bumi tahun 2018. Rumah-rumah tersebut umumnya mengalami kerusakan struktur, menggunakan material tidak permanen, memiliki sanitasi yang tidak memadai, serta berada pada kawasan yang rawan genangan air. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk melakukan perbaikan rumah secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya intervensi melalui Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan, PPK Dinas Perkim, Fasilitator Teknis, serta Penerima Manfaat menunjukkan kesesuaian dengan data sekunder. Informan menyampaikan bahwa pelaksanaan BSRS didasarkan pada tingginya angka RTLH dan keterbatasan ekonomi MBR. Sementara itu, penerima manfaat menggambarkan kondisi rumah sebelum bantuan sangat tidak layak huni, seperti dinding papan, atap bocor, lantai tanah, serta rumah yang sering terendam banjir akibat posisi bangunan lebih rendah dari badan jalan. Fasilitator teknis juga menegaskan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung lama dan merupakan gambaran umum rumah penerima manfaat BSRS di lapangan.

Secara teoritis, dalam model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, aspek Context menekankan pada identifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang yang menjadi dasar penetapan tujuan program. Program dinilai relevan apabila mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi kelompok sasaran. Dalam perspektif ini, perumahan layak dipahami sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hunian secara mandiri menunjukkan adanya kebutuhan objektif terhadap dukungan pemerintah.

Berdasarkan triangulasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program BSRS di Kecamatan Palu Barat memang sangat dibutuhkan. Program ini dirancang sebagai respon terhadap kebutuhan riil masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dikarenakan

Presentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Palu Barat 87.12% sehingga kebutuhan dan urgensi Kecamatan Palu Barat sangat perlu dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga dengan tujuan meningkatkan kualitas hunian agar layak, aman, dan sehat. Kesesuaian antara permasalahan yang dihadapi masyarakat, kebutuhan yang teridentifikasi, serta tujuan program menunjukkan bahwa secara konteks, BSRS memiliki relevansi yang kuat dan landasan yang tepat untuk dilaksanakan. Secara teoritis, perumahan layak merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Teori Kebutuhan dasar (Maslow, 1943) tersusun dalam suatu hierarki yang dimulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan tingkat tinggi. Secara spesifik, (Maslow, 1943) menyatakan kebutuhan fisiologis ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal, yang menjadi fondasi utama bagi pemenuhan kebutuhan lainnya, termasuk rasa aman. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki yang dimulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan tingkat tinggi. Dengan demikian, program BSRS secara konseptual sejalan dengan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat sekaligus pemberdayaan kelompok berpenghasilan rendah.

Input (Masukan)

Menurut Daniel L. Stufflebeam (1967), komponen Input dalam model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) berfungsi untuk menilai strategi, sumber daya, dan rencana pelaksanaan program yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi input tidak hanya menelaah kesiapan pelaksanaan, tetapi juga mempertimbangkan alternatif strategi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kesesuaian antara kebutuhan program dan kemampuan pelaksanaannya. Dengan demikian, komponen ini berperan penting untuk membantu pengambil kebijakan dalam menentukan strategi terbaik dan sumber daya paling efektif yang dapat digunakan untuk melaksanakan program secara optimal.

Menurut Ibu Nurfiyanti, bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) didesain secara terencana dan sistematis sebagai turunan dari Program Stimulan yang merupakan bagian dari 53 Program Prioritas Wali Kota Palu, yang juga sejalan dengan kebijakan perumahan dari pemerintah pusat.

SDM pelaksana sudah cukup kompeten, baik dari unsur dinas maupun fasilitator lapangan. Namun, masih ada keterbatasan jumlah fasilitator dibandingkan jumlah penerima manfaat. Dari sisi sarana, perangkat kerja dan sistem administrasi sudah memadai. Kendala utama ada pada keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan tenaga teknis di lapangan, yang menyebabkan jadwal pelaksanaan sering molor dari target. Adapun memang. Dari unsur dana juga pada tahun 2024 kami sudah mengusulkan, namun karena PAD tidak mencukupi maka program ini terhenti.”

Sementara itu, bahwa dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) telah disusun secara terencana dan melibatkan berbagai komponen pendukung, namun masih menghadapi beberapa kendala teknis dan finansial yang memengaruhi pelaksanaannya. Namun demikian, terdapat kendala signifikan yang memengaruhi keberlanjutan program, yaitu keterlambatan pencairan dana bantuan dan keterbatasan kemampuan APBD Akibatnya, pada tahun 2024 program BSRS sempat terhenti karena keterbatasan anggaran, meskipun perencanaan dan usulan telah disiapkan.

Berbeda dari Pak Yana, Pak Irsan sebagai penerima manfaat berpendapat bahwa pelaksanaan program pada telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip dasar perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat. Informasi mengenai program diterima oleh masyarakat melalui Ketua RT, yang berperan sebagai penghubung utama antara warga dan pemerintah. Hal

ini menunjukkan bahwa sistem penyebaran informasi dan koordinasi antar level pemerintahan di tingkat bawah telah berjalan efektif dan mencerminkan adanya partisipasi masyarakat sejak tahap awal pelaksanaan program.

Berbeda dari Informan sebelumnya, Pak Sofyan juga selaku penerima manfaat menjelaskan adanya kelemahan dalam koordinasi dan transparansi antara fasilitator teknis dan kelompok masyarakat. Informan mengeluhkan bahwa proses survei harga bahan bangunan tidak berjalan efisien karena sering kali diarahkan ke toko tertentu, yang menimbulkan kesan adanya intervensi atau pembatasan dalam pemilihan penyedia material. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memperoleh harga terbaik, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap netralitas dan profesionalitas pihak pelaksana di lapangan.

Data sekunder menunjukkan bahwa Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Kecamatan Palu Barat direncanakan sebagai bagian dari program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan RPJMD Kota Palu. Perencanaan program didasarkan pada hasil pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihimpun dari kelurahan, usulan masyarakat, serta hasil Musrenbang, sehingga secara administratif dan strategis program ini telah memiliki dasar perencanaan yang jelas. Skema pembiayaan menggunakan APBD dengan mekanisme bantuan stimulan dan pencairan dana secara bertahap sesuai progres pekerjaan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti fasilitator teknis, pihak pelaksana, dan *Bank* sebagai bank penyalur.

Data primer dari wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan dan PPK Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu memperlihatkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan BSRS melibatkan berbagai pihak dan melalui tahapan verifikasi yang ketat untuk menjamin ketepatan sasaran. Penentuan calon penerima manfaat dilakukan melalui usulan masyarakat dan kelurahan, diverifikasi oleh fasilitator dan Dinas, serta ditetapkan melalui keputusan wali kota palu. Penerima manfaat mengonfirmasi bahwa dana bantuan disalurkan melalui rekening pribadi di Bank Sulteng dan dicairkan secara bertahap berdasarkan laporan progres pembangunan. Namun demikian, adanya kendala berupa keterlambatan pencairan dana, keterbatasan jumlah fasilitator teknis dibandingkan jumlah penerima manfaat, serta proses administrasi dan penyusunan RAB yang dirasakan berbelit oleh masyarakat.

Secara teoritis, menurut Daniel L. Stufflebeam, aspek Input dalam model CIPP bertujuan menilai kecukupan strategi, sumber daya, dan kesiapan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek ini menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya, kecukupan SDM, kejelasan mekanisme pendanaan, serta kesiapan sasaran program. Program dinilai kuat pada aspek Input apabila memiliki perencanaan yang berbasis kebutuhan, dukungan sumber daya yang memadai, dan sistem pelaksanaan yang mampu dijalankan secara efektif di lapangan.

Berdasarkan triangulasi, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum aspek Input Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya telah dirancang dengan baik dan memiliki dasar perencanaan yang jelas serta SDM yang kompeten. Namun demikian, keterbatasan jumlah fasilitator teknis, ketidakpastian dan keterlambatan pencairan anggaran, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi kelemahan utama yang berpotensi mengurangi keoptimalan program. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa penguatan aspek Input perlu dilakukan melalui penambahan tenaga fasilitator, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan sosialisasi agar strategi dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Tabel 5. Input Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Aspek	Dinas	Fasilitator	Masyarakat
Perencanaan	Sistematis & sesuai RPJMD	Sesuai, tapi perlu pendampingan	Diketahui lewat RT
SDM	Cukup, tapi terbatas	Kurang fasilitator	Tidak tahu detail
Pencairan Dana	Sesuai mekanisme	Sering terlambat	Bertahap, kadang lama
Sosialisasi	Sudah dilakukan	Belum merata	Banyak yang tidak paham
Pelaksanaan	Sesuai prosedur	Ada kendala teknis	Ada keluhan (RAB/toko)

Process (Proses)

Menurut Daniel L. Stufflebeam (1967), teori **CIPP (Context, Input, Process, Product)** merupakan suatu model evaluasi program yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan atau kegiatan dengan memperhatikan empat komponen utama: *context* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses), dan *product* (hasil). Pada indikator process (proses), fokus evaluasi diarahkan pada bagaimana suatu program dilaksanakan, apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya mendukung tercapainya tujuan program. Evaluasi proses ini bertujuan untuk memberikan umpan balik selama pelaksanaan program berlangsung agar dapat dilakukan perbaikan secara langsung jika ditemukan penyimpangan atau hambatan di lapangan.

Menurut Ibu Nurfiyanti, meskipun pelaksanaan BSRS di Kecamatan Palu Barat berjalan sesuai Juknis, namun hasil wawancara juga menyingkap beberapa kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama terkait keterlambatan distribusi material dan kekurangan tenaga tukang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam manajemen logistik dan sumber daya pelaksana di tingkat lapangan yang dapat menghambat pencapaian target waktu pembangunan. Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian penerima manfaat belum memahami secara utuh konsep swadaya, sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap fasilitator atau pemerintah dalam proses pembangunan. Hal ini menjadi catatan penting bagi pelaksana program untuk memperkuat aspek edukasi dan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.

Menurut Bapak Yana, Proses pelaksanaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penetapan SK Penerima Manfaat, dilanjutkan dengan sosialisasi teknis pekerjaan dan mekanisme pencairan dana yang dilakukan bersama fasilitator. Dari sisi teknis, pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagian besar telah berjalan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diawasi melalui dokumentasi progres serta laporan fisik setiap tahap pembangunan. Prinsip swadaya masyarakat juga telah diimplementasikan, di mana masyarakat turut berpartisipasi langsung dalam pembangunan rumah mereka. Namun demikian, sebagian penerima manfaat masih menunjukkan ketergantungan terhadap fasilitator, sehingga prinsip kemandirian belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, dari sisi administrasi, ditemukan adanya kendala berupa keterlambatan pencairan dana tahap berikutnya yang disebabkan oleh proses verifikasi laporan teknis dan administrasi yang memerlukan waktu cukup lama. Walaupun demikian, Dinas Perkim telah berupaya melakukan evaluasi rutin setiap bulan guna mempercepat proses tindak lanjut dan memastikan bahwa setiap kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.

Berbeda dari Pak Yana, Pak Sofyan mengatakan bahwa pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis, administratif, dan koordinatif yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun program secara konseptual telah dirancang dengan baik

melalui RAB yang sesuai ketentuan, implementasinya tidak sepenuhnya mencerminkan perencanaan tersebut. Pak Sofyan menyampaikan bahwa proses pembangunan rumahnya berlangsung sangat lama, bahkan mencapai hampir satu tahun, disebabkan oleh berbagai hambatan seperti ketidaksesuaian distribusi bahan bangunan, upah tukang yang tidak mencukupi, serta keterlambatan pengiriman material. Dalam pelaksanaannya, beberapa bahan yang diajukan seperti pasir, semen, dan batako tidak disediakan secara lengkap, sehingga pekerjaan di lapangan tidak dapat berjalan lancar. Selain itu, Pak Sofyan juga mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan biaya tukang, yang seharusnya sudah termasuk dalam paket bantuan program. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis program di lapangan belum sepenuhnya efisien dan masih menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat. Lebih lanjut, pernyataan informan juga menyingkap adanya ketidaksesuaian antara RAB dan realisasi lapangan,

Sejalan dengan Pak Sofyan, Pak Aziz Jarre menyampaikan bahwa spesifikasi material dan realisasi pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kondisi material yang diterima dinilai belum cukup baik dan tidak sesuai dengan perencanaan teknis awal. Meskipun proses pembangunan rumah berjalan relatif cepat karena luas tanah yang kecil, hambatan utama tetap terjadi pada keterlambatan distribusi material dan ketidakcukupan upah tukang. Untuk mengatasi hal ini, informan memilih melibatkan saudaranya sendiri sebagai tenaga kerja, guna menghemat biaya sekaligus menjaga kelangsungan pekerjaan agar tetap berjalan.

Dalam kerangka evaluasi CIPP, aspek Process menitikberatkan pada bagaimana Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dilaksanakan di lapangan, sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis, serta bagaimana mekanisme pengendalian dan umpan balik dilakukan selama program berlangsung. Data sekunder menunjukkan bahwa pelaksanaan BSRS diatur melalui petunjuk teknis yang mengharuskan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, mulai dari penetapan penerima manfaat, sosialisasi, pencairan dana bertahap, pelaksanaan pembangunan sesuai RAB, hingga monitoring dan pelaporan progres fisik. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan berjalan terkontrol dan sesuai dengan tujuan program.

Data primer dari informan kebijakan, fasilitator teknis, dan penerima manfaat menunjukkan bahwa secara administratif pelaksanaan BSRS telah mengikuti petunjuk teknis, ditandai dengan adanya koordinasi rutin antara dinas, fasilitator, dan pihak pelaksana, serta pelaporan progres pekerjaan secara berkala. Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih ditemukan berbagai kendala proses, seperti keterlambatan distribusi material, keterbatasan tenaga tukang, keterlambatan pencairan dana tahap lanjutan, serta ketidaksesuaian antara RAB dan realisasi material. Penerima manfaat juga mengungkapkan bahwa proses pembangunan sering berjalan lambat akibat spesifikasi material yang tidak sesuai, keterbatasan upah tukang, serta minimnya pendampingan intensif dari fasilitator karena keterbatasan waktu dan jumlah lokasi dampingan.

Secara teoritis, menurut Daniel L. Stufflebeam, evaluasi Process dalam model CIPP bertujuan untuk memantau pelaksanaan program secara berkelanjutan agar penyimpangan dari rencana dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Aspek ini menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan implementasi, efektivitas mekanisme monitoring, serta kemampuan pelaksana program dalam merespons hambatan yang muncul di lapangan. Proses pelaksanaan yang tidak berjalan lancar menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian dan adaptasi program terhadap kondisi nyata.

Berdasarkan triangulasi antara data sekunder, data primer, dan landasan teori tersebut,

peneliti berargumen bahwa aspek Process Program BSRS telah berjalan secara formal sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya efektif pada tingkat implementasi teknis. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 653/871/DPKP-Perumahan/2023 menyatakan pada poin 2.4 bahwa Bentuk Bantuan Stimulan berupa uang. Uang diserahkan kepada penerima bantuan perseorangan untuk memperbaiki rumah dengan cara; a. membeli bahan bangunan; dan b. membayar upah kerja, Namun pada kenyataannya bahwa Penerima Manfaat sudah menerima dalam bentuk bahan untuk menunjuk Pihak ketiga dalam hal ini toko. Berbagai kendala seperti keterlambatan material, ketidaksesuaian spesifikasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep swadaya, serta keterbatasan intensitas pendampingan menunjukkan bahwa mekanisme proses belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan program. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa penguatan perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas dan frekuensi pendampingan lapangan, penyesuaian RAB dengan harga material, serta perbaikan sistem distribusi dan komunikasi agar pelaksanaan BSRS dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Product

Menurut Daniel L. Stufflebeam (1967), model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan mutu pelaksanaan program. Komponen terakhir dari model ini adalah Product (Produk), yang berfokus pada hasil akhir atau dampak dari suatu program terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pada indikator *product* dimaksudkan untuk menilai sejauh mana tujuan dan hasil program telah tercapai, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Tahap ini tidak hanya mengukur hasil langsung yang diperoleh, tetapi juga menelaah manfaat jangka panjang (outcome) dan dampak tidak langsung (impact) yang dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima manfaat.

Menurut Ibu Nurfiyanti, disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Kota Palu telah menunjukkan hasil yang positif dan efektif dalam mencapai tujuan program. Program ini berhasil memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang tercermin dari penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di beberapa wilayah, terutama di Kecamatan Palu Barat.

Sementara itu, Bapak Yana menilai program ini menunjukkan perkembangan positif. Namun berkelanjutan program ini terhenti pada tahun 2024 dikarenakan PAD Kota Palu tidak mencapai target. Dari aspek product, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kondisi fisik rumah, tetapi juga memberikan dampak sosial dan psikologis positif bagi masyarakat penerima manfaat, seperti meningkatnya rasa aman, kenyamanan, dan kesejahteraan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa program BSRS berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palu. namun masih memerlukan penguatan pada aspek keberlanjutan dan pemberdayaan pasca-program agar hasil yang telah dicapai dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan

Menurut Bapak Irsan, bahwa program ini memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap peningkatan kualitas hunian serta kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Sebelum menerima bantuan, kondisi rumah informan tergolong tidak layak huni, dengan bahan bangunan yang sederhana seperti dinding papan dan atap yang sering bocor, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan serta beban ekonomi tambahan akibat biaya perbaikan rutin. Namun, setelah pelaksanaan program BSRS, rumah tersebut telah berubah menjadi bangunan permanen dengan dinding batako dan atap yang kokoh, yang secara langsung meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Menurut Pak Sofyan merasa bahwa program ini memberikan dampak positif yang terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis di lapangan. Namun demikian, dari sisi pelaksanaan teknis, informan menyoroiti permasalahan distribusi material bangunan yang sering kali tidak tepat waktu dan tidak sesuai spesifikasi, seperti ketidaksinkronan antara bahan yang dikirim dan kebutuhan di lapangan, serta adanya perbedaan kualitas material dari yang telah disepakati dalam kontrak. Meskipun demikian, informan tetap mengapresiasi hasil akhir program yang secara nyata telah meningkatkan kualitas rumah dan taraf hidup keluarganya.

Berdasarkan data sekunder Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu, Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Kecamatan Palu Barat secara keseluruhan, jumlah RTLH tercatat sebanyak 163 unit, sementara realisasi BSRS hanya mencapai 21 unit. Dengan demikian, terdapat gap sebesar 142 unit, yang menunjukkan bahwa masih terdapat 142 rumah yang belum tertangani oleh program. Jika dihitung dalam persentase, capaian program BSRS hanya sebesar 12,88% dari total kebutuhan ($21/163 \times 100\%$), sedangkan gap atau kekurangan penanganan mencapai 87,12%. Angka ini secara umum mengindikasikan bahwa program BSRS belum optimal dalam memenuhi kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Pada tahun 2024, program tetap berjalan meskipun dengan jumlah lebih terbatas, yaitu 29 unit melalui skema CSR. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program BSRS secara nyata berkontribusi terhadap penurunan RTLH, khususnya di wilayah dengan tingkat kebutuhan yang tinggi.

Temuan data primer dari wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan dan PPK Dinas Perkim Kota Palu menguatkan data tersebut, di mana mereka menyatakan bahwa secara umum hasil program BSRS memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perubahan paling nyata terlihat pada kondisi fisik rumah penerima manfaat yang sebelumnya berupa rumah papan, bocor, dan tidak aman, kemudian berubah menjadi rumah permanen dengan dinding batako dan atap yang lebih kuat. Penerima manfaat juga menyampaikan bahwa setelah adanya BSRS, mereka merasa lebih aman, nyaman, dan tidak lagi terbebani biaya perbaikan rumah setiap musim hujan. Anak-anak pun dapat belajar dengan lebih tenang di rumah. Namun demikian, dari hasil wawancara juga terungkap adanya keluhan terkait keterlambatan distribusi material, ketidaksesuaian spesifikasi bahan dengan RAB, serta kualitas material yang dinilai menurun. Fasilitator teknis menambahkan bahwa meskipun perubahan fisik rumah cukup terlihat, tingkat kepuasan penerima manfaat belum sepenuhnya tinggi karena nilai bantuan dianggap belum cukup untuk menyelesaikan rumah secara tuntas dan masih menuntut kontribusi swadaya yang cukup besar.

Menurut teori CIPP yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam, aspek Product dalam evaluasi program tidak hanya menilai hasil akhir berupa output fisik, tetapi juga mencakup dampak program terhadap sasaran, tingkat kepuasan penerima manfaat, serta keberlanjutan hasil dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau diperbaiki, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan nyata penerima manfaat. Peneliti melampirkan dokumentasi daripada penerima manfaat yang sebelum mendapatkan bantuan program dan sesudah mendapatkan program.



Gambar 1. Dokumentasi Sebelum Mendapatkan Bantuan BSRS, Pak Sofyan di Kelurahan Ujuna selaku Penerima Manfaat Peningkatan Kualitas



Gambar 2. Sesudah Mendapatkan Bantuan BSRS





Gambar 3. Dokumentasi Sebelum Mendapatkan Bantuan BSRS, Pak Irsan di Kelurahan Lere selaku Penerima Manfaat Pembangunan Baru



Gambar 4. Sesudah Mendapatkan Bantuan BSRS

Berdasarkan triangulasi peneliti, Program BSRS secara umum telah berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas hunian dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian, keberhasilan tersebut

masih bersifat parsial karena belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepuasan dan keberlanjutan yang optimal. Keterbatasan besaran bantuan, permasalahan distribusi dan kualitas material, serta tuntutan swadaya yang cukup besar menjadi faktor yang memengaruhi hasil akhir program. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa ke depan program BSRS perlu disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pengawasan material, serta penguatan pemahaman penerima manfaat agar hasil program tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan adanya peningkatan kualitas perencanaan teknis, pengawasan material, serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap konsep bantuan stimulan dan swadaya, sehingga hasil Program BSRS ke depan dapat lebih optimal, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Kecamatan Palu Barat. Berdasarkan hasil evaluasi, peneliti menyimpulkan secara definitif bahwa Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Kecamatan Palu Barat telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam penanganan rumah tidak layak huni.

Pada aspek Context, program BSRS secara tepat dirancang sebagai respon terhadap tingginya angka rumah tidak layak huni di Kecamatan Palu Barat. Sasaran program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tujuan program selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, konteks pelaksanaan program dinyatakan relevan dan tepat sasaran.

Pada aspek Input, perencanaan program, mekanisme penetapan penerima manfaat, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan administrasi telah memenuhi persyaratan dasar pelaksanaan program. Meskipun terdapat keterbatasan jumlah fasilitator dan fluktuasi ketersediaan anggaran daerah, input program secara keseluruhan dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan BSRS.

Pada aspek Process, pelaksanaan program telah mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan dan melibatkan masyarakat secara aktif melalui prinsip swadaya. Namun, proses pelaksanaan belum sepenuhnya berjalan optimal karena adanya keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian distribusi material dengan rencana anggaran biaya, serta keterbatasan pendampingan fasilitator di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa aspek proses dinyatakan berjalan namun belum sepenuhnya efektif.

Pada aspek *Product*, program BSRS terbukti menghasilkan perbaikan signifikan terhadap kondisi fisik rumah penerima manfaat dan memberikan dampak positif terhadap rasa aman, kenyamanan, serta kualitas hidup keluarga. Penurunan jumlah rumah tidak layak huni di beberapa wilayah menjadi bukti nyata capaian program. Namun, tingkat kepuasan penerima manfaat belum sepenuhnya tinggi akibat keterbatasan besaran bantuan dan beban swadaya yang harus ditanggung. Meskipun demikian, hasil program secara keseluruhan dinyatakan berhasil mencapai tujuan utama kebijakan.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa Program BSRS di Kecamatan Palu Barat dinyatakan efektif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek proses dan penguatan dukungan pelaksanaan agar hasil yang dicapai dapat lebih merata, berkelanjutan, dan memberikan kepuasan yang lebih optimal bagi penerima manfaat.

DAFTAR REFERENSI**Undang-Undang**

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018*.
- Pemerintah Kota Palu. (2022). *Keputusan Wali Kota Palu Nomor 653/DPKP-Perumahan/2022*.
- Pemerintah Kota Palu. (2023). *Keputusan Wali Kota Palu Nomor 653/871/DPKP-Perumahan/2023*.

2. Buku

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik* (edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah. (2016). *Paradigma administrasi publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, J. E. (2002). *Public policymaking* (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Anggara, S. (2015). *Kebijakan publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S., & Safrudin, A. J. (2009). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Banga, W. (2018). *Administrasi publik kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damayanti, R. (2015). *Pengantar administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maksudi, B. (2017). *Administrasi publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2013). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stufflebeam, D. L. (1967). *The CIPP model for evaluation*. Columbus, OH: Ohio State University.
- Wibawa, S. (2005). *Politik perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wicaksono, K. (2006). *Administrasi dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi program pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Jurnal**
- Desyra, A., et al. (2021). *Analisis kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat*. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 5(2), 120–135.
- Hilmi, M., et al. (2018). *Evaluasi program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah*. Jurnal Kebijakan Publik, 9(1), 45–60.

Nugraha, S. (2024). *Evaluasi efektivitas program bantuan rumah swadaya di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 1–15.

Website

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Luas Wilayah dan Populasi Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id>

BAPPENAS, (2004) Laporan Perkembangan Pencapaian Pembangunan Milenium Indonesia 2004. Diakses dari: journal.ipb.ac.id

RPKD 2021-2026. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu tahun 2021-2026.

Diakses dari: <https://bappeda.palukota.go.id/web/wp-content/uploads/2022/08/RPKD-2021-2026-NET.pdf>

Media Sulawesi. (2021). BSRS Hanya Sentuh Sebagian Warga Palu Terdampak Bencana.

Diakses dari: <https://www.mediasulawesi.id/berita/bsrs-terbatas-di-palu>

Sistem Informasi Perumahan Kumuh. Diakses dari: sipku-palu.com/profile